

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hotran Yance Sinaga¹, Budiharjo², Harry Nenobais³

Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta
E-mail Korespondensi: Hotransinaga@gmail.com

Abstract

The aim of the research is to determine the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in alleviating poverty in Jekan Raya District, Palangka Raya City, Central Kalimantan Province. The research method used is descriptive qualitative with the aim of examining, qualitatively describing the Implementation of the Family Hope Program (PKH) Policy in Alleviating Poverty in Jekan Raya District, Palangka Raya City. Jekan Raya District, Palangka Raya City, Central Kalimantan Province, still needs to be optimized: First, it can be further optimized, especially in the aspects of the disposition or attitude of implementers and the environment, economy, social and politics. It is necessary to improve the capacity of community resources in Menteng Subdistrict so that the community's mindset can change for the better and it is hoped that poverty can be eradicated in Menteng Subdistrict. Second, PKH facilitators must be diligent in verifying prospective PKH recipients, which will later be useful for updating PKH recipient data, so that in subsequent years they will also be on target. Third, to verify the suitability of prospective recipients, assistants should be astute and agile because the implementation of the PKH policy must fulfill the 6 (six) Ts which include: Right target, right quantity, right quality, right time, right price and right administration. Furthermore, it is hoped that PKH facilitators can coordinate with the local RT/RW if they find that there are beneficiaries who are not worthy of being a target group, so that they can provide recommendations for the expenditure of PKH beneficiaries if they are said to be no longer worthy. Meanwhile, the suggestion is that there is a need to increase supervision of both the beneficiaries as the target group and the implementers themselves so as to minimize the risk of errors and non-compliance occurring in the program implementation process.

Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH), Poverty

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu mengetahui implementasi kebijakan program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan secara kualitatif Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Hasil penelitian dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, masih perlu dioptimalkan: *Pertama*, dapat lebih dioptimalkan lagi terutama pada aspek disposisi atau sikap pelaksana dan lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Peningkatan terhadap kemampuan sumber daya masyarakat di Kelurahan Menteng perlu untuk ditingkatkan sehingga pola pikir masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik dan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Menteng. *Kedua*, pendamping PKH harus rajin melakukan verifikasi calon penerima PKH yang nantinya berguna untuk memutakhirkan data penerima PKH, agar tahun-tahun berikutnya juga tepat sasaran. *Ketiga*, untuk meverifikasi kelayakan calon penerima, hendaknya pendamping cerdik dan cekatan dikarenakan implementasi kebijakan PKH harus memenuhi 6 (enam) T yang meliputi: Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi. Selanjutnya, diharapkan kepada

pendamping PKH dapat berkoordinasi dengan RT/RW setempat jika ditemukan adanya penerima manfaat yang tidak layak menjadi target grup, agar dapat memberikan rekomendasi pengeluaran penerima manfaat dari penerima manfaat PKH apabila sudah dikatakan sudah tidak layak lagi. Sedangkan sarannya adalah perlunya peningkatan pengawasan baik terhadap penerima manfaat sebagai target grup serta implementor itu sendiri sehingga mampu meminimalisir resiko kesalahan-kesalahan dan ketidakpatuhan yang terjadi pada proses pelaksanaan program.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan sumber daya alam yang melimpah dibandingkan dengan negara lainnya. Pengelolaan sumber daya alam tersebut sangat diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pengentasan kemiskinan. Menurut Suparlan dalam Umajah, Siti (2008:45), kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung dampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus

urbanisasi ke kota, merupakan hal yang lebih parah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemerintah pusat memberikan kewenangan tersendiri kepada pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah masyarakat yang tergolong miskin, sehingga pemerintah pusat hanya memberikan kebijakan untuk penanggulangan masyarakat miskin selanjutnya urusannya diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan kesejahteraan sosial yang bersifat dekonsentrasi.

Banyak kebijakan pemerintah yang tertuang dalam program-program bantuan sosial dalam mensejahterakan masyarakat dan upaya mengentaskan kemiskinan. Seperti yang diungkapkan oleh Dunn dalam Syafie (2006:106) bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan

masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Sejalan dengan pengertian tersebut, Pemerintah membuat suatu kebijakan publik dengan menerbitkan suatu program sebagai upaya pengentasan kemiskinan, program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan ini dijalankan sebagai amanah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, dan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan. PKH menjadikan sebuah program jaminan sosial yang unik dimana disatu sisi PKH merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan dalam konteks kebutuhan dasar terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan, namun disisi lain PKH juga bernuansa pemberdayaan yaitu menguatkan rumah tangga miskin agar mampu keluar dari kemiskinannya melalui peningkatan kesehatan dan mendorong anak untuk bersekolah. Sasaran dari PKH adalah keluarga sangat miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan masuk kedalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Program Keluarga Harapan

merupakan program yang dikeluarkan melalui Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mewujudkan program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan sebagai bantuan sosial besyarat bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai di dorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Melalui Program Keluarga Harapan, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendam

pingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

Tentunya hal ini menjadi perhatian bagi Dinas Sosial, Kecamatan Jekan Raya dan Kelurahan Menteng dalam mengimplementasikan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari: 1). Masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak menyelesaikan pendidikan di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan keterbatasan pendapatan orang tua dalam membiayai sekolah anak; 2). Rendahnya pendidikan masyarakat di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berimplikasi terhadap sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga masyarakat malas untuk bekerja; 3). Berkurangnya hasil sumber daya alam menyebabkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari; 4). Beban keluarga semakin berat diakibatkan pandemi *covid-19* yang hampir

melumpuhkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah; dan 5). Kebijakan Program Keluarga Harapan yang saat ini masih berjalan belum terimplementasi dengan baik sehingga pengentasan kemiskinan sulit untuk dilakukan di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah". Hal-hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah; 2). Apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar mengatakan "penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat

populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat studi” (Moeleong, 2007: 43). Dengan berdasarkan data yang ada, penulis akan berusaha untuk mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan fokus. Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk memperoleh data-data yang baru dilapangan yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti, dengan begitu, peneliti tahu data mana yang perlu dikumpulkan. Penetapan fokus penelitian juga diperlukan untuk melakukan pembatasan-pembatasan penggunaan teori yang memang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian. Fokus terhadap teori-teori yang akan digunakan sangat membantu agar tujuan penelitian dapat terperinci dengan jelas. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi terhadap pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan mencari data-data yang diperlukan untuk laporan. Peneliti menggunakan observasi non partisipatif, dimana peneliti akan datang langsung ke lokasi penelitian, akan tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya wawancara mendalam, yang dilakukan kepada para informan yaitu Kepala Dinas

Sosial Kota Palangka Raya, Lurah Menteng, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Pendamping PKH Kecamatan Jekan Raya, Perwakilan Penerima Bantuan PKH yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait Implementasi Program Keluarga Harapan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan pengumpulan dokumentasi terhadap Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Lurah Menteng, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Pendamping PKH Kecamatan Jekan Raya, Perwakilan Penerima Bantuan PKH. Analisis data yang digunakan dengan melakukan reduksi data terhadap hasil wawancara yang diperoleh, penyajian data, triangulasi data dan menarik kesimpulan yang mengacu pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit. Untuk dapat melukiskan kerumitan dalam proses implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari definisi implementasi kebijakan yang berbeda diungkapkan oleh Bardach dalam Agustino (2006:54) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijakan. Menurut Nugroho (2008:433), bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Adapun untuk mengimplementasikan kebijakan publik dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur dan proses kebijakan, karena melalui tahap ini dapat diketahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai cara dalam mengimplementasikannya.

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Sudah berjalan dengan baik namun beberapa hal yang perlu dipotimalkan kembali agar implementasi PKH di Kelurahan Menteng semakin baik dan memperoleh hasil yang maksimal sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Menteng. Dari 6 (enam) variabel teori implementasi kebijakan terdapat 4 (empat) teori variabel yang mendukung implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Menteng yaitu tujuan, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi

pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, sedangkan 2 (dua) variabel lainnya yaitu variabel disposisi atau sikap pelaksana dan variabel lingkungan, sosial, ekonomi dan politik kurang mendukung implementasi kebijakan PKH tersebut. Analisis hasil penelitian implementasi kebijakan PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dengan menggunakan 6 (enam) variabel sebagaimana telah disebutkan diatas. Variabel pertama adalah tujuan, standar dan sasaran kebijakan, variabel ini mendukung pengimplementasian kebijakan program keluarga harapan di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, karena berdasarkan penelitian dilapangan pengimplementasian PKH dinilai sudah tepat sasaran, pemberian bantuan PKG sudah memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah juga memahami dan menjalankan apa yang menjadi tujuan implementasi kebijakan PKH dengan memperhatikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sehingga diharapkan pengentasan kemiskinan di Kelurahan Menteng dapat diwujudkan. Variabel kedua adalah variabel sumber daya. Pentingnya kualitas dan kuantitas sumber daya di Kelurahan Menteng diharapkan mampu mendukung pengimplementasian kebijakan PKH di Kelurahan Menteng. Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan PKH di Kelurahan Menteng

sangat bergantung dari kemampuan Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang ada. Sumber daya yang ada di Kelurahan Menteng dalam pengimplementasian PKH tentunya melibatkan peran dengan tugas dan fungsi dari masing-masing pemangku kepentingan yang sudah tersusun dengan baik dan disertai dengan pendanaan yang memadai.

Variabel ketiga yaitu karakteristik organisasi pelaksana. Variabel juga merupakan variabel yang mendukung pengimplementasian kebijakan PKH di Kelurahan Menteng. Berdasarkan penelitian lapangan bahwa koordinasi yang dilakukan dinilai berjalan dengan baik di tingkat Kota Palangka Raya hingga ke kelurahan, setiap pelaporan yang disampaikan dari tingkat bawah cepat direspon di jenjang kecamatan dan kota. Selanjutnya, bahwa pelaksana implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Menteng tersebut, pemangku kepentingan maupun pemerintah sudah mengetahui masing-masing tugasnya sehingga pembagian tugas terukur dan pelaksanaannya efektif dan efisien. Selain itu, semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang menjadi tujuannya dan siapa sasaran yang akan dituju, kerjasama yang terjalin selama ini dapat mencapai tujuan yang harus dicapai dalam pengimplementasian kebijakan PKH tersebut. Variabel keempat adalah disposisi atau sikap pelaksana, namun berdasarkan penelitian lapangan,

variabel ini kurang mendukung pengimplementasian kebijakan PKH di Kelurahan Menteng, hal tersebut disebabkan karena sikap masyarakat yang kurang memahami proses dalam PKH. Keluarga penerima manfaat cenderung menuntut agar pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih namun keluarga penerima manfaat masih ditemukan tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH. Pola pikir masyarakat yang hanya mau menerima hak namun belum menjalankan kewajiban seutuhnya menjadi hal yang kurang mendukung implementasi kebijakan PKH sebagai Upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Menteng. Variabel kelima adalah variabel komunikasi antar organisasi pelaksana. Variabel ini turut mendukung pengimplementasian PKH di Kelurahan Menteng, komunikasi yang terjalin dari tingkat pusat ke tingkat daerah sudah terjalin dengan baik, koordinasi yang dilakukan juga dinilai sudah cukup baik. Setiap pemangku kepentingan mempunyai tugas masing-masing dalam mengimplementasikan kebijakan PKH tersebut. Komunikasi organisasi yang terjalin selama ini digunakan untuk memperbaharui informasi-informasi baik itu dilingkup pemerintah daerah maupun masyarakat. Komunikasi yang informatif juga sangat diperlukan oleh masyarakat, pemerintah daerah bersama pendamping PKH dituntut untuk dapat mensosialisasikan kebijakan PKH tersebut dengan sebaik-baiknya. Pembaharuan informasi terhadap

pengimplementasian PKH di Kelurahan Menteng diharapkan dapat ditindaklanjuti baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga keberhasilan kebijakan PKH tersebut dapat dicapai.

Variabel terakhir adalah variabel lingkungan, sosial, ekonomi dan politik. Variabel ini kurang mendukung implementasi kebijakan PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Menteng, hal tersebut dilihat bahwa faktor ekonomi dan lingkungan serta sosial berdampak kurang baik terhadap implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Menteng, pola pikir masyarakat yang kurang memperhatikan pendidikan menyebabkan masyarakat tidak mau bersekolah, selain itu ketimpangan pendapatan antara masyarakat kaya dan masyarakat kurang mampu juga membuat kesenjangan sosial yang menyebabkan masyarakat yang kurang mampu meniru gaya hidup masyarakat yang kaya. Selanjutnya, kecemburuan sosial dari masyarakat bersuku dayak terhadap masyarakat yang bukan bersuku dayak dikarenakan masyarakat bersuku dayak tidak memenuhi persyaratan sebagai keluarga penerima manfaat untuk menerima bantuan PKH tersebut. Pola pikir masyarakat yang seperti itu perlu diubah terlebih dahulu sehingga dapat menerima dan melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.

Aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan PKH di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan PKH yang sudah dijalankan selama ini, keberhasilan implementasi kebijakan PKH ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan tersebut dan penganggarannya seperti apa. Mekanisme penyaluran PKH tersebut tentunya membutuhkan banyak peran baik dari pemerintah daerah, Pendamping PKH, Pelaksana PKH (baik di Kabupaten/Kota, hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan) dan Keluarga Penerima Manfaat, artinya setiap orang yang terlibat didalam pengimplementasian kebijakan ini harus memiliki karakter yang kuat dan berkomitmen untuk dapat menjalankannya. Komunikasi antar pemangku kepentingan juga menjadi hal yang krusial untuk dilakukan, setiap kendala apapun yang terjadi dilapangan harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, teridentifikasi bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilaksanakan dengan baik. Namun ada dua hal yang perlu dioptimalkan yaitu pada aspek disposisi atau sikap pelaksana dan aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan politik. Pada aspek

disposisi atau sikap pelaksana perlu dioptimalkan karena sikap masyarakat yang kurang mampu memahami proses implementasi PKH yang sudah dijelaskan oleh Pemerintah Daerah. Masyarakat cenderung untuk menuntut agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dengan jumlah yang lebih. Pola pikir masyarakat yang hanya mau menerima hak namun belum menjalankan kewajiban seutuhnya menjadi hal yang kurang mendukung implementasi kebijakan PKH sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Menteng. Aspek kedua yang perlu dioptimalkan adalah lingkungan, sosial, ekonomi dan politik. Hal tersebut disebabkan karena pola pikir masyarakat yang kurang memperhatikan pendidikan menyebabkan masyarakat tidak mau bersekolah, selain itu faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi implementasi PKH di Kelurahan Menteng. Ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan masyarakat yang kurang mampu juga membuat kesenjangan sosial yang menyebabkan masyarakat kurang mampu meniru gaya hidup seperti hidup orang kaya. Selain itu, kecemburuan sosial dari masyarakat yang bersuku dayak terhadap masyarakat yang bukan bersuku dayak dikarenakan masyarakat bersuku dayak tidak memenuhi persyaratan sebagai keluarga penerima manfaat untuk menerima bantuan PKH tersebut.

Aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

program keluarga harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yaitu: Aspek tujuan, standar dan sasaran kebijakan, aspek sumber daya, aspek karakteristik organisasi pelaksana, aspek komunikasi antar organisasi pelaksana, aspek disposisi atau sikap pelaksana dan aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan politik. Dari enam aspek tersebut, aspek yang mendukung implementasi kebijakan PKH tersebut terdiri dari empat aspek yaitu: aspek tujuan, standar dan sasaran kebijakan, aspek sumber daya, aspek karakteristik organisasi pelaksana, dan aspek komunikasi antar organisasi pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Slamet (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto), *Jurnal Wacana Vol 6 No. 2 Universitas Brawijaya*.
- Dwiyanto, Agus (2017). Reformasi Birokrasi Publik Indonesia Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Kaelan, H. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta: Paradigma.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nugroho, Riant. (2008). Public Policy.
Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo.
- Parsons, Wayne. (2011). Public
Policy: Pengantar Teori Dan
Praktik Analisa Kebijakan.
Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah.
(2010). Metodologi Penelitian.
Yogyakarta: Andi.
- Sasmito Cahyo (2019). Implementasi
Program Keluarga Harapan
Dalam Upaya Mengentaskan
Kemiskinan di Kota Batu, *Jurnal
Inovasi Sektor Publik
Universitas Tribhuwana Tungga
Dewi Malang*.
- Silalahi, Uber. (2012). Metode
Penelitian Sosial. Bandung: PT.
Refika Aditama.
- Sugiyono. (2012). Metode penelitian
kuantitatif Kualitatif Dan R&d.
Bandung Alfabeta.
- Utomo Dedy (2011). Pelaksanaan
Program Keluarga Harapan
Dalam Meningkatkan Kualitas
Hidup Rumah Tangga Miskin
(Studi pada Unit Pelaksana an
Program Keluarga Harapan
Kecamatan Purwoasri,
Kabupaten Kediri, *Jurnal
Administrasi Publik Universitas
Brawijaya*.
- Wicaksono, Kristian Widya. (2006).
Administrasi dan birokrasi
Pemerintah. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
- Winarno, Budi. (2014). Teori
dan Proses Kebijakan Publik.
Yogyakarta: Media Presindo.